



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun anggaran dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021, yang mana disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan lebih dititik beratkan pada perubahan anggaran yang terjadi dalam implementasi program/kegiatan ataupun sub kegiatan akibat dari adanya pandemi corona virus disease 2019 (COVID 19) yang melanda bangsa ini. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan ini merupakan faktor yang mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkesinambungan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan adanya refocusing dan efisiensi anggaran.

Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat di akhir Tahun 2021. Pada akhirnya, kami menyadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan. Saran serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Piru, Agustus 2021

KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE
NIP. 19640912 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Landasan Hukum.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEMESTER II TAHUN 2021.....	42
4.1 Program dan Kegiatan.....	42
4.2 Pendanaan SKPD.....	44
4.3 Matrik Renja SKPD Tahun 2021.....	44
BAB V PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.....	18
Tabel 2.3 Reviuw terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021.....	28
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	Hal 17
-----------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Selanjutnya dalam urusan bidang pangan merujuk pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif. Selaras dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 salah satunya adalah memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) Pemantapan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan dengan Peningkatan Produksi Pangan Utama; (2) Stabilisasi Harga Pangan; (3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat; (4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pangan.

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumber daya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor ketahanan pangan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun 2017-2022, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin dari terpenuhinya pangan utama, tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan

memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya dalam mencapai indikator utama secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah:

- a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (Action Plan) dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra);
- b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang perlu diselesaikan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, serta konsumsi dan keamanan pangan akibat dari adanya pandemi COVID 19;
- c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya,

dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 berlandaskan pada :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;

- 11) Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
- 3.2 Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama 1 semester tahun anggaran.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan selama satu semester. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Semester I (satu) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022. Adapun penyusunan Renja Perubahan ini, oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Perubahan ini juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja pada semester I (satu) tahun anggaran berjalan (2021) sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan pada Semseter II (dua) tahun 2021; dan

- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menurut DPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.355.262.500,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.2.253.320.400,- dan Belanja Langsung Rp.956.319.600.00,- dengan keseluruhan Program/Kegiatan serta Sub Kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan. dengan adanya pandemi COVID 19 yang berimplikasi pada refocusing dan efisiensi anggaran, dimana hal tersebut sangat berdampak dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan akibat dari terjadinya pengurangan dan penghilangan kegiatan. Untuk lebih jelas pengukuran kinerja sampai triwulan II dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN 2021

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
				K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 7+12	14 = (13/5)*100%						
1	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintah yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA/KOTA	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintah yang prima	75	3.605.524.690	106	2.162.015.374	134	3.237.179.275	25	533.793.700	25	794.374.700	25	0	25	0	100	1.328.168.400	234	4.565.347.675	312	127
2	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD	75	103.804.690	100	72.069.000	2	89.507.900	25	0	25	47.605.000	25	0	25	0	100	47.605.000	102	137.112.900	1	132
3	Tersedianya Dokumen LAKIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP)	75	15.958.690	100	5.000.000	1 Dok	14.507.900	25	6400000	25	0	25	0	25	0	100	6.400.000	101	20.907.900	1	131
4	Tersusunnya Laporan Monev Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan	75	87.846.000	100	67.069.000	1 Paket	75.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	101	75.000.000	1	85

5	Tersedianya Penyediaan Jasa Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keuangan	75	2.288.380.400	100	1.739.749.974	35	OB	2.221.830.400	25	533.793.700	556.473.700	25	0	25	0	75	1.090.267.400	110	3.312.097.800	1	145
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75	2.155.280.400	100	1.683.129.974	29	Org/bulan	2.155.280.400	25	533.793.700	533.793.700	25	0	25	0	100	1.067.587.400	129	3.222.867.800	2	150
7	Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan dan Adm. Kepegawaian	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelolah Keuangan dan Adm. Kepegawaian	75	133.100.000	100	56.620.000	6	Org/bulan	66.550.000	25	0	22.680.000	25	0	25	0	100	22.680.000	106	89.230.000	1	67
8	Tersedianya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	75	893.101.000	130	122.511.400	70		648.960.000	25	0	65.396.000	25	0	25	0	100	65.396.000	170	714.356.000	2	80
9	Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perengkapan Kantor	75	292.820.000	0	0	0	Paket	150.000.000	25	0	0	25	0	25	0	100	-	100	150.000.000	1	51
10	Tersedianya ATK selama Setahun	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan ATK selama 1 Thn Anggaran	75	14.641.000	100	15.215.600	30	Jenis	154.310.000	25	0	17.791.000	25	0	25	0	100	17.791.000	130	172.101.000	2	1175
11	Terlaksananya Rakor dan Konsult dalam dan Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsult dalam dan Luar Daerah	75	585.640.000	90	107.295.800	40	OH	344.650.000	25	0	47.605.000	25	0	25	0	100	47.605.000	140	392.255.000	2	67
12	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	75	278.445.200	100	206.015.000	26	Jns/Bl n	235.087.575	25	0	124.900.000	25	0	25	0	100	124.900.000	126	359.987.575	2	129
13	Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya Penunjang Kegiatan Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Selama 1 Tahun	75	10.980.750	100	4.015.000	2	Jenis	5.490.375	25	0	1.350.000	25	0	25	0	100	1.350.000	102	6.840.375	1	62

14	Tersedianya Jasa Listrik dan Data Internet Selama 1 Tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Data Internet	75	3.194.400	100	4.000.000	12 Bln	1.597.200	25	0	25	1.050.000	25	0	25	0	100	1.050.000	112	2.647.200	1	83
15	Tersedianya Jasa Honoror dan Jasa Pengemudi Eselon II	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror dan Jasa Pengemudi	75	264.270.050	100	198.000.000	12 Bln	228.000.000	25	0	25	122.500.000	25	0	25	0	100	122.500.000	112	350.500.000	1	133
16	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	75	41.793.400	100	21670000	1 Unit	41.793.400	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	101	41.793.400	1	100
17	Tersedianya Biaya Perawatan Kendis Jabatan Eselon II	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendis Jabatan Eselon II yang terpelihara	75	41.793.400	100	21.670.000	1 Unit	41.793.400	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	101	41.793.400	1	100
18	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan Dan Kehutanan Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	75	352.587.950	149	84.739.600	26 Desa	160000000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	126	160.000.000	2	45
19	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Akses Distribusi Pangan Masyarakat	75	352.587.950	149	84.739.600	26 Desa	160.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	126	160.000.000	2	45
20	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Berkembangnya Cadangan Pangan Daerah	75	60.500.000	99	28.292.100	4 Desa	55.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	104	55.000.000	1	91

21	Meningkatnya Kinerja Poktan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Poktan yang Terbina	75	292.087.950	100	56.447.500	22 Desa	105.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	122	105.000.000	2	36
22	Peningkatan Luas Tanam dan Luas Panen	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	75	322.102.000	100	130.875.500	6 Pkt/Kl pk	292.820.000	25	0	25	38.710.000	25	0	25	0	100	38.710.000	106	331.530.000	1	103
23	Tersedianya Data dan Informasi Rantai Pasokan Pemasaran Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penguatan Data Informasi Rantai Pasokan Pemasaran Pangan	75	102.487.000	100	82.909.500	5 Pkt/Kl pk	93.170.000	25	0	25	38.710.000	25	0	25	0	100	38.710.000	105	131.880.000	1	129
24	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Lahan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Poktan yang memanfaatkan Lahan Pekarangan	75	36.602.500	100	40.264.500	4 Klpk	33.275.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	104	33.275.000	1	91
25	Tersedianya Laporan Ketersediaan Pangan Pokok	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Ketersediaan Pangan Pokok menjelang HKBN	75	65.884.500	99	42.645.000	1 Paket	59.895.000	25	0	25	38.710.000	25	0	25	0	100	38.710.000	101	98.605.000	1	150
26	Terpenuhinya Pola Pangan Harapan (PPH) Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sesuai target Daerah	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Kenaikan Pola Pangan Harapan (PPH), Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	75	219.615.000	90	47.966.000	1 Pkt	199.650.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	101	199.650.000	1	91
27	Tersedianya dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	75	219.615.000	90	47.966.000	1 Paket	199.650.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	101	199.650.000	1	91

28	Cakupan Daerah Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	75	181.500.000	99	40.694.700	1 Dok	125.000.000	25	0	25	34.852.000	25	0	25	0	100	34.852.000	101	159.852.000	1	88
29	Tersedianya dokumen peta FSVA Kab. SBB	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten	75	181.500.000	99	40.694.700	1 Dok	125.000.000	25	0	25	34.852.000	25	0	25	0	100	34.852.000	101	159.852.000	1	88
30	Terlaksananya penyusunan peta FSVA Kabupaten	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta FSVA Kabupaten	75	181.500.000	99	40.694.700	1 Dok	125.000.000	25	0	25	34.852.000	25	0	25	0	100	34.852.000	101	159.852.000	1	88
31	Tersedianya Data dan Informasi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Daerah	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Keamanan Pangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	75	219615000	99	48.625.000	11 Kec	112.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	111	112.000.000	1	51
32	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian penganekaragaman konsumsi pangan	75	219.615.000	99	48.625.000	11 Kec	112.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	111	112.000.000	1	51
33	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Kabupaten	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen (Sertifikasi) jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PAST) Kabupaten	75	219.615.000	99	48.625.000	11 Kec	112.000.000	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	111	112.000.000	1	51
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25	53.379.370	25	86.793.670	25	-	25	-	98	140.173.040				

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah tahun 2021, kesesuaian alokasi anggaran berdasarkan uraian kegiatan per masing-masing bidang yang tertuang dalam APBD, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan PEMDA.

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (Rp.6.400.000).
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp.55.100.000)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp.2.155.280.400)
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Rp.68.040.000)
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp.117.792.500)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp.35.922.100)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rp.249.304.000)
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PEMDA.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp.3.840.000)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rp.3.000.000)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp.210.000.000)
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp.40.920.000)

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.

- a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (Rp.30.680.000).

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Rp.50.959.200).
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rp.160.794.300)
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Rp.41.480.000)
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Rp.41.220.000)
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Rp.39.380.000)
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten (Rp.44.140.000)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan, hal ini disebabkan dalam penyusunan RENSTRA masih mengikuti acuan kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Perubahan urusan Ketahanan Pangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM.

SPM Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tingkat Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera;
- b. Memandirikan masyarakat dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- c. Tersedianya barang dan terbayarnya gaji pegawai secara maksimal dengan persentase 100%.

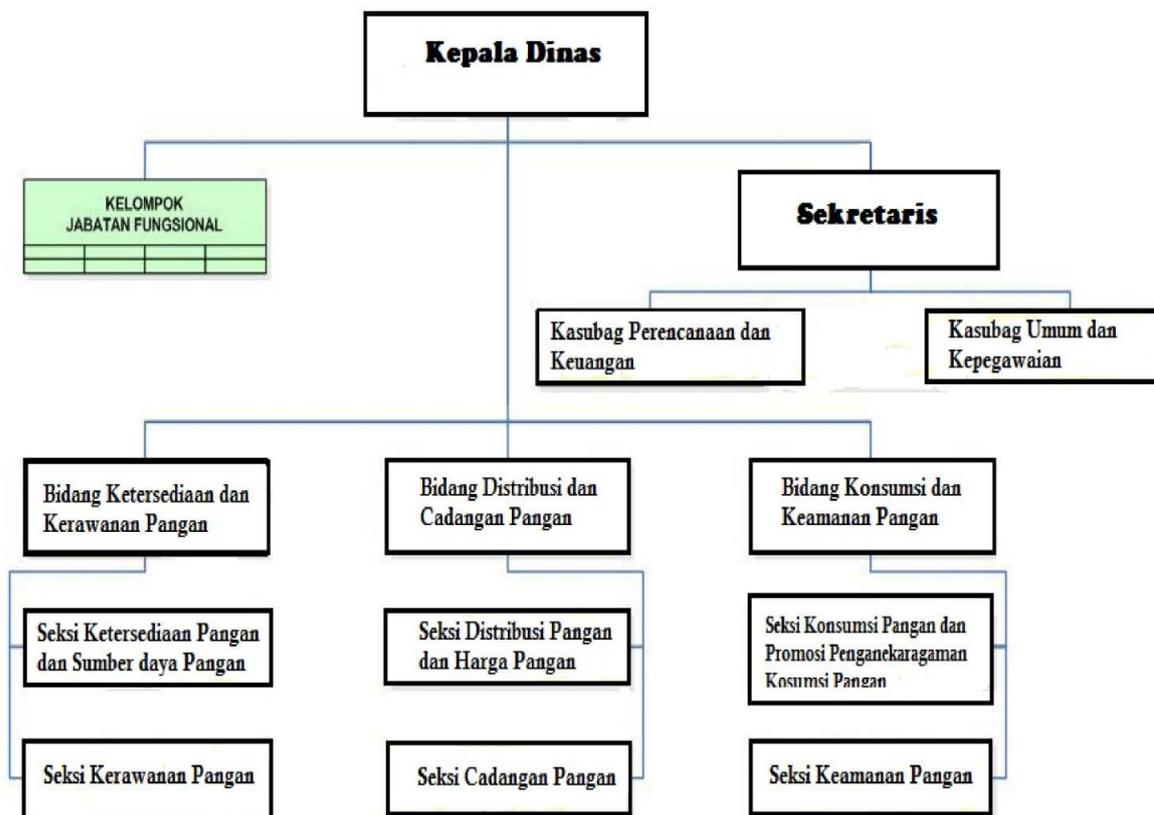
Berdasarkan pada Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Ketahanan Pangan yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 08 Tahun 2017, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan dengan kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, dengan fungsi yang melekat yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ketahanan Pangan;
2. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Ketahanan Pangan berdasarkan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2017 dengan Nomenklatur "Dinas Ketahanan Pangan" memiliki struktur seperti gambar dibawah ini.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Seram Bagian Barat, dengan susunan organisasi seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Dinas Ketahanan Pangan



Dinas Ketahanan Pangan terbentuk pada tahun 2017 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sampai tahun 2021 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020, dimana realisasi anggaran terhadap kinerja sasaran diulaskan dalam Tabel.2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Anggaran Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2021.

LAPORAN PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEMESTER I												
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT												
TAHUN ANGGARAN 2021												
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :		DINAS KETAHANAN PANGAN										
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH	REALISASI ANGGARAN SEMESTER I dan II			JUMLAH	PERSENTASE (%)		SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		KEUANGAN	FISIK	
1	2	3			4	5			6	7	8	9
2.3.01	BELANJA LANGSUNG											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.010.000	61.500.000	0,00	62.510.000	0,00	6.400.000	0,00	6.400.000	100	200	(56.110.000)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000	100,00	100,00	0,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.010.000	55.100.000,00	0,00	56.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(56.110.000)
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.320.400	0,00	0,00	2.223.320.400	1.085.267.740	0,00	0,00	1.085.267.740	83	200	(1.138.052.660)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.155.280.400,00	0,00	0,00	2.155.280.400,00	1.062.587.740,00	0,00	0,00	1.062.587.740	49,30	100,00	(1.092.692.660)
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.040.000,00	0,00	0,00	68.040.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	22.680.000	33,33	100,00	(45.360.000)
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.310.000	285.226.100	115.482.500	403.018.600	0,00	65.396.000	0,00	65.396.000	68,62	149,53	(337.622.600)
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.310.000	-	115.482.500	117.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(117.792.500)
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	35.922.100	0,00	35.922.100	0,00	17.791.000	0,00	17.791.000	49,53	49,53	(18.131.100)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	249.304.000,00	0,00	249.304.000,00	0,00	47.605.000	0,00	47.605.000	19,10	0,00	(201.699.000)

D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	0,00	216.840.000	0,00	216.840.000	0,00	124.900.000	0,00	124.900.000	128,49	300,00	(91.940.000)
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.840.000	0,00	3.840.000	0,00	1.350.000	0,00	1.350.000	35,16	100,00	(2.490.000)
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000	0,00	1.050.000	0,00	1.050.000	35,00	100,00	(1.950.000)
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	210.000.000	0,00	210.000.000	0,00	122.500.000	0,00	122.500.000,00	58,33	100,00	(87.500.000)
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	40.920.000	0,00	40.920.000	0,00	40.920.000	-	40.920.000	100,00	100,00	0,00
11	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	40.920.000	0,00	40.920.000	0,00	40.920.000	0,00	40.920.000	100,00	100,00	0,00
II PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN												
A	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.620.000	70.019.200	0,00	81.639.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	(81.639.200)
12	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	4.210.000	26.470.000	0,00	30.680.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(30.680.000)
13	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	7.410.000	43.549.200	0,00	50.959.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.959.200)
III PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7.730.000	164.404.300	30.140.000	202.274.300	4.210.000	34.500.000	0,00	38.710.000	93	100	(163.564.300)
14	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.520.000	127.134.300	30.140.000	160.794.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.794.300)
15	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4.210.000	37.270.000	0,00	41.480.000	4.210.000	34.500.000	0,00	38.710.000	93,32	100,00	(2.770.000)

B	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3.200.000	38.020.000	0,00	41.220.000	3.200.000	38.020.000	0,00	0,00	0,00	100,00	(41.220.000)
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.200.000	38.020.000	0,00	41.220.000,0	3.200.000	38.020.000	0,00	0,00	0,00	100,00	(41.220.000)
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
A	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1.010.000	38.370.000	0,00	39.380.000	1.010.000	33.842.000	0,00	34.852.000	89	0,00	(4.528.000)
17	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1.010.000	38.370.000	0,00	39.380.000	1.010.000	33.842.000	0,00	34.852.000	88,50	0,00	(4.528.000)
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
A	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	3.120.000	41.020.000	0,00	44.140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.140.000)
18	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.120.000	41.020.000	0,00	44.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.140.000)
TOTAL		2.253.320.400	956.319.600	145.622.500	3.355.262.500	1.093.687.740	343.978.000	0,00	1.396.445.740	42	1.250	(1.958.816.760)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Daerah semakin terbatas, karena:

- 1) Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
- 2) Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
- 3) Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
- 4) Tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
- 5) Terbatasnya dukungan permodalan di tingkat petani;
- 6) Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
- 7) Adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas;
- 8) Masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani

b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan

kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.

- c. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
- d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur.
- f. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian.
- g. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- h. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan.

Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas

konsumsi pangan. Ketidاكلancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena disamping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga karena ketergantungan terhadap ekspor pangan.

Permasalahan lain dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya biaya angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak pada kenaikan harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 2) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 4) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai dengan saat ini kegiatan pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) Keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;

- b) Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) Dukungan sosialisasi, Promosi peningkatan Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan mutu pangan melalui berbagai media masih terbatas, dan
- d) Masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Belakangan ini berbagai kasus gangguan Kesehatan manusia, akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) Belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- d) Terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- e) Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum dibidang pangan segar;
- f) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan

Sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Komitmen Pemerintah Daerah masih rendah akan adanya kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Komitmen dan langkah nyata Pemerintah Daerah belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- c. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
- e. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- f. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- g. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

2.4. Reviuw terhadap rancangan RKPD TAhun 2021

Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2021. Sampai saat penyusunan Perubahan Rencana Kerjaini dilakukan, perkiraan kebutuhan masih tetap sama, dengan kata lain tidak ada perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 yang tertuang dalam RKPD Kota Pekanbaru, terdiri dari 5 (Lima) program dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp.5.779.739.578,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						5.779.739.578	0					
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.857.899.078	0					
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						89.507.900	0					
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersusunnya Dokumen Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	14.507.900	0	
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersusunnya Laporan Monev Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Paket	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan	1 Paket	Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan	1 Paket	75.000.000	0	
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.235.805.900	0					
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	29 Orang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	Terbayarnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	2.155.280.400	0	
2	09	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Adm. Kepegawaian	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	6 Orang	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	6 Orang	Tersedianya Jasa Tenaga Pengelola Keuangan dan Aset SKPD	6 Orang	66.550.000	0	

2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir SKPD	1 Dokumen	13.975.500	0
2	09	01	2,05		Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah										328.861.303	0
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian khusus	Kab. Seram Bagian Barat	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	40 Stel	Jumlah pakaian kerja lapangan dan pakaian khusus	40 stel	Kelengkapan Atribut Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Khusus	40 Stel	204.361.303	0
2	09	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersusunnya Peraturan Daerah Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	8 Orang	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	8 orang	Tersedianya Regulasi Daerah bidang Ketahanan Pangan	8 Orang	124.500.000	0
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										655.615.000	0
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Paket	Terpenuhinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Paket	150.000.000	0
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya ATK dan jumlah penyediaan makan minum rapat, tamu dan jumlah perayaan hari-hari besar Nasional/daerah dalam satu tahun	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	3 Paket	Jumlah Ketersediaan ATK serta Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Perayaan HBN/Daerah	3 Paket	Pemenuhan ATK serta Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Perayaan HBN/Daerah	3 Paket	154.310.000	0
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Paket	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1 Paket	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	6.655.000	0
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya Rakor dan Konsult dalam dan luar daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	40 OH	Jumlah Rakor dan Konsult dalam dan luar daerah	40 OH	Terpenuhinya Rakor dan Konsult dalam dan Luar Daerah	40 OH	344.650.000	0

2	09	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										225.650.000	0	
2	09	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya kendaraan operasional/lapangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	5 Unit	Jumlah kendaraan operasional/lapangan	5 Unit	Terpenuhinya Kendaraan Operasional/Lapangan	5 Unit	100.000.000	0
2	09	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Meubeler Kantor	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Paket	Pengadaan mebel kantor	1 Paket	Terpenuhinya Meubeler Kantor	1 Paket	125.650.000	0
2	09	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										235.087.575	0	
2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Materai dan Benda Pos lainnya	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	350 Keping	Jumlah 2 jenis materai selama 12 bulan	350 Keping	Terpenuhinya materai dan Benda Pos Lainnya	350 Keping	5.490.375	0
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya rekening listrik dan Pulsa Data Internet	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah rekening listrik dan data pulsa internet kantor	12 Bulan	Terpenuhinya pembayaran listrik dan data pulsa internet selama 1 tahun	12 Bulan	1.597.200	0
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Tenaga Honor dan Jasa pengemudi mobil jabatan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	17 Orang	Jumlah pegawai honor dan supir	17 Orang	Terlaksananya pelayanan umum kantor dan jasa pengemudi mobil jabatan	17 Orang	228.000.000	0
2	09	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										87.371.400	0	
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya pemeliharaan kendis jabatan eselon II	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Unit	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 Unit	Terlaksananya pemeliharaan kendis jabatan eselon II	1 Unit	41.793.400	0

2	09	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	14 Unit	Jumlah pemeliharaan komputer/laptop	14 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14 unit	12.303.000	0
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	33.275.000	0
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										226.550.000	0
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										226.550.000	0
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya cadangan pangan daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	4 Desa	Berkembangnya cadangan pangan daerah	4 Desa	Terpenuhinya cadangan pangan daerah	4 Desa	55.000.000	0
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kinerja Kelompok Tani (Poktan)	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	22 Desa	Jumlah Poktan yang terbina	22 Desa	Jumlah kelompok tani mandiri	22 Desa	105.000.000	0
2	09	02	2,01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya peta alur distribusi pangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	1 Paket	Tersusunnya Road Map alur distribusi pendukung kemandirian pangan	1 Paket	Tersalurnya hasil panen aneka jenis tanaman pangan	1 Paket	66.550.000	0
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										930.940.500	0
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										253.888.250	0
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya data dan informasi neraca bahan makan (NBM) Kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Paket	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	1 Paket	Terpenuhinya Ketersediaan pangan Lokal	1 Paket	59.895.000	0

2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	4 Kelompok	Jumlah Poktan yang memanfaatkan Lahan Pekarangan	4 Kelompok	Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga		33.275.000	0
2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya data dan informasi kondisi ketahanan pangan daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen kondisi ketahanan pangan daerah	1 Dokumen	Terpantaunya kondisi ketahanan pangan daerah	1 Dokumen	34.273.250	0
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Dokumen Ketersediaan pangan menjelang HBKN	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Paket	Jumlah Dokumen Laporan Ketersediaan Pangan Pokok menjelang HBKN	1 Paket	Terpenuhinya ketersediaan pangan menjelang HBKN	1 Dokumen	59.895.000	0
2	09	03	2,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya lembaga usahatani produktif dan perorangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Paket	Jumlah usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok tani dan perorangan	1 Paket	Peningkatan ekonomi rumah tangga tani	1 Paket	66.550.000	0
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										175.750.000	0
2	09	03	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	2 Kegiatan	Jumlah pertemuan regional Dewan Ketahanan Pangan dan Keikut sertaan Daerah dalam Pameran Hari Pangan Sedunia	2 Kegiatan	Terlaksananya pengendalian cadangan pangan daerah	2 Kgtm	140.750.000	0
2	09	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Dokumen profil ketahanan pangan daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Dokumen	Jumlah dokumen profil ketahanan pangan daerah	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen profil ketahanan pangan kabupaten	1 Dokumen	35.000.000	0

2	09	03	2,03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi									188.850.000	0		
2	09	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terpenuhinya data dan informasi rantai pasokan dan produksi komoditi pangan serta pemenuhan konsumsi pangan segar menjelang hari besar keagamaan dan nasional	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	2 Paket	Tersedianya data dan informasi rantai pasokan dan produksi komoditi pangan serta pemenuhan konsumsi pangan segar menjelang hari besar keagamaan dan nasional	2 Paket	Terlaksananya pasokan dan produksi komoditi pangan serta pemenuhan konsumsi pangan segar menjelang hari besar keagamaan dan nasional	2 Paket	188.850.000	0
2	09	03	2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									312.452.250	0		
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan (PPH Konsumsi) berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Dokumen	Jumlah dokumen analisis pola pangan harapan (PPH Konsumsi) berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi	1 Dokumen	Terpenuhinya dokumen analisis pola pangan harapan (PPH Konsumsi) berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi	1 Dokumen	39.930.000	0
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya anekaragaman menu baru berbahan pangan lokal	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Paket	Jumlah anekaragaman menu baru berbahan pangan lokal	1 Paket	Terpenuhinya anekaragaman menu baru berbahan pangan lokal	1 Paket	72.872.250	0
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	1 Paket	Jumlah dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	1 Paket	Terpenuhinya dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	1 Paket	199.650.000	0
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									457.750.000	0			
2	09	04	2,01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									125.000.000	0		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya penyusunan peta FSVA Kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	1 Dokumen	125.000.000	0
2	09	04	2,02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									332.750.000	0		
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	1 Paket	Jumlah penanganan kasus pada daerah rawan pangan daerah	1 Paket	Penurunan angka kasus pada daerah rawan pangan daerah	1 Paket	266.200.000	0

2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya Beras cadangan pangan daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	4 Ton	Jumlah kuantitas penyaluran beras cadangan pangan	4 Ton	Terlaksananya Pemenuhan Beras Cadangan Pangan Daerah	4 Ton	66.550.000	0
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										306.600.000	0
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										306.600.000	0
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang sehat dan berkualitas	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan keamanan pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat	1 Paket	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang sehat dan berkualitas	1 Paket	Terpenuhinya keamanan pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang sehat dan berkualitas	1 Paket	112.000.000	0
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Terlaksananya sosialisasi dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan keamanan pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat	6 Desa	Jumlah sosialisasi dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Desa	Peningkatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Desa	113.100.000	0
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan keamanan pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat	11 Kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten	11 Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten	11 Kecamatan	81.500.000	0
TOTAL															5.779.739.578	0

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RKPD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada RPJMD 2017-2022 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pangan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perbaiki indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
- 2) Penambahan pagu kegiatan SKPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 3) Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, ataupun melalui pokok-pokok pikiran dari Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat serta dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana deskripsi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DAFTAR USULAN PROGRAM KEGIATAN YANG DISETUJUI UNTUK DIAKOMODIR OLEH PERANGKAT DAERAH									
PADA PELAKSANAAN MUSRENBANG RPKD TINGKAT KECAMATAN									
No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Kecamatan	Volume	Pagu Indikatif
1	Peningkatan pengelolaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak penggunaan pestisida (residu pestisida)	Sentra Produksi Pangan di 11 Kecamatan	11 Kecamatan	1 Paket	198.000.000
2			Program Penangan Daerah Rawan Pangan	Peningkatan Gizi Balita	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan bayi dan anak	Semua Desa dan Dusun di Kecamatan Huamual	Huamual	1 Paket	180.000.000
3			Program Peningkatan Ketahanan pangan	Pengadaan Mesin Pengolah Sagu	Meningkatnya Luas Lahan dan Luas panen	Desa Tomalehu	Amalatu	4 Unit	100.000.000
4				Pengadaan Mesin Pengolah Umbi-umbian	Meningkatnya Luas Lahan dan Luas Panen	Desa Tomalehu	Amalatu	4 Unitt	160.000.000
5				Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari	Meningkatnya peningkatan ekonomi rumah tangga	Desa Tihulale	Amalatu	3 Kelompok	75.000.000
6			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan aman	Anekaragam menu baru berbahan pangan lokal	Semua Desa di 11 Kecamatan	11 Kecamatan	1 Paket	165.000.000
7			Program Peningkatan Ketahanan pangan	Pertanian Masuk Sekolah	Peningkatan pengetahuan pertanian usia dini dalam mempersiapkan cadangan Pangan	7 Desa di Kec. Seram Barat	Seram Barat	1 Paket	144.000.000
8			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Lumbung Pangan	Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah	Desa Buria	Taniwel	1 Unit	55.000.000
9				Pengadaan Mesin Pengolah Umbi-umbian	Meningkatnya Luas Lahan dan Luas Panen	Desa Elpaputih	Elpaputih	3 Unit	160.000.000
10				Pembentukan Lembaga Tani	Tersedianya wadah penjualan hasil pangan	Desa Waimital	Kairatu	2 Paket	200.000.000
11				Pemanfaatan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Desa Waisala	Huamual Belakang	1 Paket	75.000.000
12				Pulau Mandiri Pangan	Terbinanya Kelompok sasaran dalam pengembangan potensi sumber daya pangan lokal	Semua Desa di Kecamatan Kep. Manipa	Kep. Manipa	1 Paket	200.000.000
JUMLAH									1.712.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN dan PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, disusun berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2019-2024 serta RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Untuk lebih jelasnya arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2019-2022 atau NAWA CITA JILID II adalah : Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

- a) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, daging, gula, cabai dan bawang merah;
- b) Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan;
- c) Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat;

- d) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim serta serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, maka diperlukan upaya-upaya yang memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2017-2022, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa;
- 2) Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah);
- 3) Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas;
- 4) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 6) Memperkuat pembangunan infrastruktur;
- 7) Mengembangkan pembangunan kepariwisataan;
- 8) Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Dari 8 (delapan) misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung salah satu misi yaitu misi ke 5 (lima) yakni : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan :

- 1) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta mewujudkan pelayanan yang prima;
- 2) Menuju kemandirian rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah 2017-2022 yang dilaksanakan melalui 1(satu) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan

Visi :	"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal".		
Misi :	"Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta pelayan yang prima	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintahan yang prima;	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.	Menyediakan ATK serta sarana penunjang lainnya.
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Menyediakan Bimtek tata kelola pemerintahan.
Menuju kemandirian rakyat	Meningkatnya produksi nilai	Meningkatkan kesejahteraan petani	Cakupan Kesejahteraan Petani.

Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari	tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.	dan tersedianya sumber pangan yang stabil	Menyediakan kegiatan peningkatan luas tanam dan luas panen.
	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.
		Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan.	Mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal
		Penanganan daerah rawan pangan.	Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat.

Tujuan dan sasaran pada Renja Perangkat Daerah akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi Kepala Daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta

penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya kemandirian pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

BAB IV
RENCANA KERJA dan PENDANAAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2021

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah, dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021, direncanakan melalui 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan PEMDA.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (Rp.12.800.000).
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp.78.600.000)
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp.2.155.280.400)
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Rp.68.040.000)
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp.117.372.500)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp.38.900.000)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rp.237.441.000)
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PEMDA.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp.3.120.000)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rp.3.000.000)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp.210.000.000)
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp.37.080.000)
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah KabupatenProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (Rp.63.500.000).
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Rp.50.959.200).
- 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Rp. 65.000.000)
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rp.153.052.600).
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Rp.72.480.000).
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Rp. 50.000.000)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Rp.35.630.000).
- 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Rp.36.880.000).
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Rp.66.000.000)
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten (Rp.38.640.000)

4.2. Pendanaan SKPD

Pagu Indikatif	Rp 3.592.765.700
Belanja OPD	
a. Rencana Belanja Tidak Langsung	Rp 2.223.320.400
b. Rencana Belanja Langsung	Rp 1.369.445.300

4.3. Matrik Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini. (Terlampir dalam Lampiran 1)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan tahun 2021 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, dimana dalam penyusunannya dengan mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan demi mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di daerah yang berjuluk Saka Messe Nusa ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat

KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE

NTP 19640917 199407 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Semester II Tahun 2021

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERAMA BAGIAN BARAT

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Seseudah Perubahan		Lokasi	Sumber Pendanaan	Pagu Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN BUKAN PELAYANAN DASAR										
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2.09.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD							62.510.000	91.400.000	28.890.000
2.09.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	3 Dok	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Dok	Piru	APBD	6.400.000	12.800.000	6.400.000
2.09.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Monev Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan Ketahanan Pangan	1 Paket	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan Ketahanan Pangan	1 Paket	Piru	APBD	56.110.000	78.600.000	22.490.000
2.09.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.223.320.400	2.223.320.400	0,00
2.09.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	29 Orang	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	25 Orang	Piru	APBD	2.155.280.400	2.155.280.400	0,00
2.09.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pengelolah Keuangan dan Adm. Kepegawaian	Jumlah Tenaga Pengelolah Keuangan dan Adm. Kepegawaian	6 Orang	Jumlah Tenaga Pengelolah Keuangan dan Adm. Kepegawaian	6 Orang	Piru	APBD	68.040.000	68.040.000	0,00

2.09.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								403.018.600	393.713.500	(9.305.100)
2.09.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer	1 Paket	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer	1 Paket	Piru	APBD	117.792.500	117.372.500	- 420.000
2.09.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK selama Tahun	Jumlah Ketersediaan ATK selama 1 Thn Anggaran	36 Jenis	Jumlah Ketersediaan ATK selama 1 Thn Anggaran	36 Jenis	Piru	APBD	35.922.100	38.900.000	2.977.900
2.09.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rakor dan Konsult dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rakos dan Konsult dalam dan Luar Daerah	54 OK	Jumlah Rakos dan Konsult dalam dan Luar Daerah	30 OK	Piru	APBD	249.304.000	237.441.000	- 11.863.000
2.09.01..08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								216.840.000	216.120.000	(720.000)
2.09.01..08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya Penunjang Kegiatan Perkantoran	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Selama 1 Tahun	320 Keping	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Selama 1 Tahun	260 Keping	Piru	APBD	3.840.000	3.120.000	- 720.000
2.09.01..08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Data Internet Selama 1 Tahun	Jumlah Rekening Lkistrik dan Data Internet	12 Bulan	Jumlah Rekening Lkistrik dan Data Internet	12 Bulan	Piru	APBD	3.000.000	3.000.000	0,00
2.09.01..08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Honoror dan Jasa Pengemudi Eselon II	Jumlah Tenaga Honoror dan Jasa Pengemudi	17 Orang	Jumlah Tenaga Honoror dan Jasa Pengemudi	17 Orang	Piru	APBD	210.000.000	210.000.000	0,00
2.09.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40.920.000	37.080.000	(3.840.000)
2.09.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Perawatan Kendis Eselon II	Jumlah Kendis yang terpelihara	1 Unit	Jumlah Kendis yang terpelihara	1 Unit	Piru	APBD	40.920.000	37.080.000	- 3.840.000
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										
2.09.02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								81.639.200	114.459.200	32.820.000
2.09.02.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	Berkembangnya Cadangan Pangan Daerah	4 Desa	Berkembangnya Cadangan Pangan Daerah	2 Desa	Kab. SBB	APBD	30.680.000	63.500.000	32.820.000
2.09.02.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meningkatnya Kinerja Poktan	Jumlah Poktan yang Terbina	6 Poktan	Jumlah Poktan yang Terbina	6 Poktan	Kab. SBB	APBD	50.959.200	50.959.200	-

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
2.09.03.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								202.274.300	290.532.600		88.258.300
2.09.03.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan Utama Daerah	1 Doumen	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	1 Dokumen	Kab. SBB	APBD	0,00	65.000.000		65.000.000
2.09.03.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Lahan	Jumlah Poktan yang memanfaatkan Lahan Pekarangan	8 Poktan	Jumlah Poktan yang memanfaatkan Lahan Pekarangan	2 Poktan	Kab. SBB	APBD	160.794.300	153.052.600	-	7.741.700
2.09.03.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Laporan Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Dokumen Laporan Ketersediaan Pangan Pokok menjelang HKBN	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Ketersediaan Pangan Pokok menjelang HKBN	1 Dokumen	Kab. SBB	APBD	41.480.000	72.480.000		31.000.000
2.09.03.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								41.220.000	84.620.000		43.400.000
2.09.03.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH-Konsumsi)	Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH-Konsumsi) berdasarkan Rekomendasi Angka Kecukupan Gizi	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH-Konsumsi) berdasarkan Rekomendasi Angka Kecukupan Gizi	1 Dokumen	Kab. SBB	APBD	0,00	50.000.000		50.000.000
2.09.03.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Tersedianya dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	Jumlah dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	1 Paket	Jumlah dokumen sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Kabupaten	1 Paket	Kab. SBB	APBD	41.220.000	34.620.000	-	6.600.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								39.380.000	102.880.000		63.500.000
2.09.04.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								39.380.000	36.880.000		(2.500.000)
2.09.04.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya penyusunan peta FSVA Kabupaten	Jumlah Dokumen Peta FSVA Kabupaten	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Peta FSVA Kabupaten	5 Dokumen	Kab. SBB	APBD	39.380.000	36.880.000	-	2.500.000

Lampiran II. Tabel Refocusing Anggaran

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021	RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.206.640.000	148.622.500	0	0	3.355.262.500	3.024.254.300	150.782.500	0	0	3.175.036.800	(180.225.700)	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.831.126.500	115.482.500	0	0	2.946.609.000	2.684.522.500	115.482.500	0	0	2.800.005.000	(146.604.000)	
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					62.510.000	0	0	0	62.510.000	43.810.000	0	0	0	43.810.000	(18.700.000)	
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. SBB		6.400.000	0	0	0	6.400.000	6.400.000	0	0	0	6.400.000	0		
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,		56.110.000	0	0	0	56.110.000	37.410.000	0	0	0	37.410.000	(18.700.000)		
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.223.320.400	0	0	0	2.223.320.400	2.223.320.400	0	0	0	2.223.320.400	0	
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,		2.155.280.400	0	0	0	2.155.280.400	2.155.280.400	0	0	0	2.155.280.400	0		
2	09	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas)	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,		68.040.000	0	0	0	68.040.000	68.040.000	0	0	0	68.040.000	0		
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				28	7.536.100	115.482.500	0	0	403.018.600	164.192.100	115.482.500	0	0	279.674.600	(123.344.000)	
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,		2.310.000	115.482.500	0	0	117.792.500	1.890.000	115.482.500	0	0	117.372.500	(420.000)		
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,		35.922.100	0	0	0	35.922.100	24.891.100	0	0	0	24.891.100	(11.031.000)		
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat,	24	9.304.000	0	0	0	249.304.000	137.411.000	0	0	0	137.411.000	(111.893.000)		

2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21	6.840.000	0	0	0	216.840.000	216.120.000	0	0	0	216.120.000	(720.000)	
2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat		3.840.000	0	0	0	3.840.000	3.120.000	0	0	0	3.120.000	(720.000)	
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat	21	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.920.000	0	0	0	40.920.000	37.080.000	0	0	0	37.080.000	(3.840.000)	
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Seram Bagian Barat		40.920.000	0	0	0	40.920.000	37.080.000	0	0	0	37.080.000	(3.840.000)	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				78.639.200	3.000.000	0	0	81.639.200	67.889.200	3.000.000	0	0	70.889.200	(10.750.000)	
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				78.639.200	3.000.000	0	0	81.639.200	67.889.200	3.000.000	0	0	70.889.200	(10.750.000)	
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat		30.680.000	0	0	0	30.680.000	25.630.000	0	0	0	25.630.000	(5.050.000)	
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.959.200	3.000.000	0	0	50.959.200	42.259.200	3.000.000	0	45.259.200	(5.700.000)		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN			21	3.354.300	30.140.000	0	0	243.494.300	196.742.600	32.300.000	0	229.042.600	(14.451.700)		
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan			17	2.134.300	30.140.000	0	0	202.274.300	161.112.600	32.300.000	0	193.412.600	(8.861.700)		
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	654.300	30.140.000	0	0	160.794.300	120.332.600	32.300.000	0	152.632.600	(8.161.700)		
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.480.000	0	0	0	41.480.000	40.780.000	0	0	40.780.000	(700.000)		

2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan			41.220.000	0	0	0	41.220.000	35.630.000	0	0	35.630.000	(5.590.000)		
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.220.000	0	0	0	41.220.000	35.630.000	0	0	35.630.000	(5.590.000)		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			39.380.000	0	0	0	39.380.000	36.880.000	0	0	36.880.000	(2.500.000)		
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan			39.380.000	0	0	0	39.380.000	36.880.000	0	0	36.880.000	(2.500.000)		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.380.000	0	0	0	39.380.000	36.880.000	0	0	36.880.000	(2.500.000)		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			44.140.000	0	0	0	44.140.000	38.220.000	0	0	38.220.000	(5.920.000)		
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah			44.140.000	0	0	0	44.140.000	38.220.000	0	0	38.220.000	(5.920.000)		
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.140.000	0	0	0	44.140.000	38.220.000	0	0	38.220.000	(5.920.000)		